

## **Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Komitmen Organisasi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

**Reza Ilham Putra<sup>1\*</sup>, Halmawati<sup>2</sup>**

<sup>1,2.</sup> Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang

\*Korespondensi: [rezailham98@gmail.com](mailto:rezailham98@gmail.com)

---

### **Abstract**

*This study aims to determine the effect of application of regional financial accounting systems, organizational commitment and internal control systems on the quality of the financial statements of the local government of Solok City. This study uses primary data obtained by distributing questionnaires to 24 SKPD within the Solok City Government with a total of 48 questionnaires distributed and each SKPD consisting of 2 samples. The sample in this study are employees who are responsible for making local government financial reports. The selection of respondents using purposive sampling method. The results of the study indicate that The SAKD variable has an effect on the LKPD quality variable. The organizational commitment variable has no effect on the LKPD quality variable. SPI has no effect on the quality of LKPD. The results of this study can be used as an evaluation and consideration for the SKPD of Solok City in the process of preparing financial reports in order to achieve good quality financial reports. This can be done by improving the implementation of the regional financial accounting system properly.*

**Keywords:** *Application of Regional Financial Accounting Systems; Organizational Commitment; Internal Control Systems; and Quality of Local Government Financial Reports.*

### **How to cite (APA 6<sup>th</sup> style)**

Putra, Reza Ilham & Halmawati (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Komitmen Organisasi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 4 (3), 589-597.

---

### **PENDAHULUAN**

Sektor publik di beberapa daerah di Indonesia pada sekarang ini mengalami beberapa fenomena yang mana akuntabilitas publik semakin dituntut agar bekerja lebih baik lagi dalam pengelolaan laporan keuangan. Bersumber pada pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih mendapatkan beberapa masalah dalam Laporan Keuangan Daerah (LKPD) yang menjurus ke tindak pidana korupsi. Dalam pandangan ekonomi organisasi “sektor publik merupakan suatu satuan yang mempunyai kegiatan dalam usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan kepada publik dalam rangka memenuhi tugas dan tanggung jawabnya” (Pramudiarta : 2015). Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban dalam mempertanggung jawabkan pelaporan keuangan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan pada sebelumnya (Stanbury : 2003 dalam Mardiasmo : 2006).

LKPD merupakan penggambaran mengenai keadaan dan kemampuan keuangan pada sebuah entitas, oleh karenanya LKPD tersebut harus berkualitas agar dapat menggambarkan kondisi dan kinerja secara akurat. LKPD yang berkualitas dapat dilihat dari informasi yang disajikan telah mencapai syarat karakteristik kualitatif, jika LKPD telah memenuhi syarat tersebut, maka hasil dari LKPD dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.

Pada pengukuran karakteristik kualitatif LKPD, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan badan pemerintahan yang mempunyai tugas untuk pemeriksaan atas laporan keuangan, BPK merupakan entitas yang memiliki wewenang, terkait LKPD, BPK memiliki 4 tingkatan dalam memberikan opini terhadap laporan keuangan, yang pertama yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang kedua Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yang ketiga Tidak Wajar (TW) dan yang terakhir Tidak Memberi Pendapat (TMP).

Berdasarkan opini BPK sebagai pengukur kualitas LKPD di atas, WTP merupakan peringkat kualitas laporan keuangan tertinggi dalam pemeriksaan LKPD. Hal tersebut menggiring peneliti pada Pemerintah Daerah Kota Solok, dimana laporan hasil pemeriksaan tahun anggaran 2012-2019 sudah mengalami beberapa perubahan. Namun BPK masih menemukan beberapa permasalahan dalam laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah kota solok pada tahun anggaran 2019, salah satunya pemeriksaan atas sistem pengendalian internal Kota Solok yakni, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan pada beberapa bendahara pengeluaran organisasi perangkat daerah belum tertib dan nilai investasi non permanen lainnya berupa dana bergulir tidak valid dan tidak dapat diyakini kewajarannya, namun Kota Solok tetap mempertahankan opini WTP yang didapat dari BPK pada LKPD tahun 2019 tersebut .

Hasil riset terdahulu oleh (Dzulfikar Ahli Fikri, 2016) yang menyimpulkan bahwa pengaruh kompetensi sumberdaya manusia, sistem pengendalian internal dan standar akuntansi pemerintahan, berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sementara itu hasil riset yang dilakukan oleh penelitian (Emilda Ihsanti, 2014) dalam pengujiannya variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah memperoleh hasil tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yohanes Suhardjo, 2019) juga menyatakan sistem akuntansi keuangan daerah juga tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Pada penelitian lainnya juga dilakukan oleh (Liza Rahayu Kennedy dan Yuneita Anisma, 2014) hasil penelitian tersebut mengatakan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## **REVIUW LITERATUR DAN HIPOTESIS**

### **Teori keagenan**

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pemberi amanat (*agent*) untuk mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada prinsipal (*principal*) yang berhak menuntut tanggung jawab tersebut (Mardiasmo, 2004), dalam (As Syifa Nurillah, 2014).

Hubungan antara teori keagenan dengan penelitian ini adalah pemerintah yang bertindak sebagai agen (pengelola pemerintahan) yang harus menetapkan strategi tertentu agar dapat memberikan pelayanan terbaik untuk public sebagai pihak prinsipal. Pihak principal tentu menginginkan hasil kinerja yang baik dari agen dan kinerja tersebut salah satunya dapat dilihat dari laporan keuangan dan pelayanan yang baik, sedangkan bagaimana laporan keuangan dan pelayanan yang baik tergantung dari strategi yang diterapkan oleh pihak pemerintah. Apabila kinerja pemerintah baik, maka masyarakat akan mempercayai pemerintah, kesimpulannya pemilihan strategi akan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat sebagai pihak principal terhadap pemerintah sebagai agen. Menurut teori agensi,

pemerintah memiliki akses langsung terhadap informasi dibandingkan rakyat sehingga timbul asimetri informasi. Hal ini yang terkadang dapat memicu tindakan korupsi oleh agen. Oleh sebab itu, pemerintah harus dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam upaya mengurangi asimetri informasi (Agusti, 2014).

### **Kualitas Laporan Keuangan**

Untuk pengambilan keputusan, hasil laporan keuangan yang bagus akan menampilkan penjelasan mengenai hasil yang dapat dengan mudah dipahami oleh para pengambil keputusan, pengambilan keputusan yang dimaksud disini adalah pengguna laporan keuangan baik pihak internal maupun pihak eksternal. Kesalahan material dapat dijadikan perbandingan dalam laporan keuangan periode sebelumnya, sehingga laporan keuangan yang akan dibuat pada periode berikutnya dapat menimalisir kesalahan material yang akan terjadi. Tetapi, harus diketahui juga bahwa laporan keuangan tahunan tidak memberikan semua informasi yang dibutuhkan pengguna laporan keuangan untuk membuat keputusan. Secara umum, laporan keuangan mencerminkan dampak peristiwa periode sebelumnya dan tidak perlu mengandung informasi non-keuangan.

### **Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

(Nordian : 2006) sistem akuntansi keuangan daerah adalah suatu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaporan keuangan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, pengaplikasiannya dapat dilakukan dengan *software* atau dilakukan secara manual. Sistem akuntansi keuangan daerah memiliki tujuan (Yohanes Suharjo : 2019) untuk menggambarkan serangkaian proses yang saling terkait yang dipergunakan sesuai dengan aturan yang berlaku untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan oleh bagian internal dan eksternal untuk pengambilan keputusan.

### **Komitmen Organisasi**

Komitmen organisasi (Rahman Arif : 2011) merupakan sikap atau gambaran seseorang untuk lebih memihak kepada kepentingan organisasi tersebut daripada kepentingan sendiri, dan memiliki visi dan misi yang sama dengan organisasi tersebut. Pengertian lainnya juga menjelaskan bahwa komitmen organisasi merupakan suatu keinginan yang ada di dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu agar dapat berperan penting dan berguna dalam keberhasilan organisasi sesuai dengan tujuan dan kepentingan organisasi tersebut. Dalam komitmen organisasi lebih mengutamakan kepentingan dan tujuan organisasi dibandingkan dengan kepentingan individu.

### **Sistem Pengendalian Internal**

Menurut (Yohanes Suhardjo : 2019) Sistem pengendalian internal bermakna sebagai sebuah proses atau sistem yang telah diterapkan pada suatu entitas, yang bertujuan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan dalam hal keterandalan informasi laporan keuangan dan aturan yang berlaku dan diharapkan dapat menimalisir terjadinya kesalahan. (Saputra: 2015) dalam (Yohanes Suhardjo: 2019) mengatakan bahwa, sistem pengendalian internal sangat bermanfaat apabila didukung dengan penerapan standar akuntansi pemerintahan yang baik, sehingga akan menghasilkan LKPD yang berkualitas.

### **Pengembangan Hipotesis**

#### **Pengaruh Penerapan SAKD terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Mulyadi : 2001) dalam (Emilda Ihsanti : 2014), penelitian tersebut menjelaskan tujuan sistem akuntansi keuangan daerah yaitu untuk

memperbaiki tingkat keandalan informasi akuntansi dan perlindungan kekayaan suatu entitas yang mana dalam penerapan tersebut harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Informasi yang terkandung dalam pelaporan keuangan daerah sebaik mungkin harus mencantumkan informasi yang relevan sehingga akan memudahkan untuk pengambilan keputusan, jika penerapan SAKD telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku maka akan menghasilkan laporan keuangan yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika laporan keuangan yang dipublikasikan buruk, artinya laporan keuangan tersebut dihasilkan dari sistem akuntansi yang buruk sehingga didalamnya mengandung kesalahan yang material dalam penyajian, tidak disusun sesuai dengan standar pelaporan, dan tidak tepat waktu dalam penyampainnya maka hal itu akan berdampak buruk bagi para pengguna laporan dan pihak penyaji laporan itu sendiri. (Mahmudi. 2010). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tutun Hermawanto Botutihe (2013), dimana hasil penelitiannya, bahwa dengan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik maka akan berdampak terhadap kualitas laporan keuangan daerah yang baik pula atau sebaliknya.

Penelitian ini juga dilakukan oleh (Surya Adhitama : 2017), hipotesis pada penelitian tersebut menghasilkan pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penerapan SAKD juga memengaruhi kualitas LKPD, didapatkan pada hasil riset yang dilakukan oleh (Surya Adhitama : 2017), sehingga hasil dari kedua penelitian tersebut tidak memperoleh hasil yang sama. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diajukan hipotesis berikut:

**H1:** Penerapan SAKD berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

### **Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Dalam komitmen organisasi tingkat partisipasi seseorang agar bertahan dalam suatu institusi tersebut sangat berpengaruh terhadap kelangsungan dan kelancaran dalam mencapai tujuan sebuah organisasi, komitmen organisasi sebagai sejauh mana mereka bekerja untuk tetap atau tidak meninggalkan organisasi tersebut. (Wibowo, 2017) menyebutkan bahwa komitmen organisasi berkaitan dengan tingkat keterlibatan orang dalam organisasi dimana mereka bekerja untuk tetap tinggal dalam organisasi tersebut. Komitmen yang semakin tinggi terhadap organisasi akan cenderung lebih mudah dalam melakukan pekerjaan, seseorang yang memiliki tanggung jawab dalam organisasi hal tersebut akan mempengaruhi kualitas LKPD. Dengan tidak adanya komitmen organisasi maka akan mengurangi kepedulian SDM untuk melaksanakan tugasnya dalam pencapaian tujuan organisasi.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Fitri Mariana Tampubolon, Ahmad Basid : 2019) dimana pada hasil penelitian tersebut komitmen organisasi memperoleh hasil hipotesis positif atas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diajukan hipotesis berikut:

**H2:** Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

### **Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Informasi yang diperoleh dari (Permendagri no. 13 tahun 2006) menghasilkan, sistem pengendalian internal merupakan suatu skema atau prosedur yang bertujuan untuk meminimalisir atas kesalahan dan ketidak samaan dengan aturan yang berlaku atas pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dalam laporan keuangan yang patut dicontoh dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan”. Pengawasan internal di Kabupaten atau Kota dipercayakan kepada aparatur pengawasan internal pemerintah yang disebut Inspektorat. faktor yang

mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah adalah pengendalian internal. Sistem akuntansi memerlukan pengendalian internal karena sistem akuntansi sebagai sistem informasi merupakan hal yang sering mengalami masalah baik disengaja maupun tidak disengaja (Husna, 2017). Jika sistem pengendalian internal baik, prosedur akuntansi dapat dengan mudah diarahkan, diawasi, dan dideteksi jika terjadi kecurangan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan mencapai tujuannya dan menyajikan informasi keuangan yang andal dan unggul (Yendrawati, 2013). Penelitian yang dilakukan oleh (Lailatur Rohmah : 2020) dan (As Syifa Nurillah, Dul Muid : 2014) menyatakan bahwa pengendalian internal memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diajukan hipotesis berikut:

**H3:** Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yakni metode survei, dimana data dikumpulkan dari sampel untuk mewakili seluruh populasi dengan menggunakan kuesioner (Masri Singatimbin : 1989). “Penelitian survei merupakan suatu penelitian kuantitatif dengan menggunakan pertanyaan terstruktur atau sistematis yang sama kepada banyak orang, untuk kemudian seluruh jawaban yang diperoleh peneliti dicatat, diolah, dan dianalisis”. (Bambang Prasetyo : 2005).

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai bidang keuangan pada masing-masing SKPD di Kota Solok, berjumlah 24 SKPD. Jumlah responden berjumlah 45 responden, dalam penerapannya menggunakan *purposive sampling*. kriteria responden dalam riset ini adalah: (1) Pejabat yang menyelenggarakan fungsi akuntansi atau keuangan administrasi di semua dinas SKPD Kota Solok, (2) Memiliki pengalaman satu tahun dalam penyusunan pelaporan akuntansi. Kriteria ini dianggap cukup mewakili populasi untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini menggunakan skala Likert 1 – 5.

Penelitian ini dilakukan menggunakan *software* SPSS 20. Metode analisis data yang diterapkan pada riset ini meliputi uji validitas, uji reabilitas, uji normalitas, multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Selanjuta menggunakan uji regresi linier berganda (uji F) dan (uji t) pada taraf signifikansi  $< 0,05$ .

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Untuk pengujian normalitas dalam penelitian ini, digunakan uji *Kolmogorov Smirnov* (K-S) nilai signifikansi 0,05. Pada uji tersebut menampilkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* variabel bebas dan terikat  $> 0,05$ . Berdasarkan hasil pengujian tersebut didapatkan hasil pada semua variabel pada penelitian ini mendapatkan hasil normal.

Pengujian uji multikolinearitas dalam penelitian ini, nilai toleransi untuk semua variabel bebas adalah  $> 0,1$  dan pada nilai FIV  $< 10$  dan untuk menguji heteroskedastisitas peneliti menggunakan metode uji Glejser, hasil nilai sig. variabel bebas  $> 0,05$ . Berdasarkan hasil dari penhujian tersebut semua variabel bebas dari heteroskedastisitas.

Selanjutnya, pada koefisien determinasi (*adjusted R square*) diperoleh nilai sebesar 0,452, dengan hasil tersebut bahwa 45,2% besarnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dijelaskan oleh variabel kompetensi sumberdaya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, komitmen organisasi dan sistem pengendalian internal. Sedangkan 54,8% dijelaskan oleh variabel lain.

### **Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan hasil uji  $t$ , diketahui nilai  $t$  variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah sebesar 4,031 dengan nilai Sig 0,000. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Solok.

Variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dilihat dari kesesuaian sistem akuntansi keuangan dengan SAP, pengidentifikasian dan pencatatan transaksi dan pembuatan laporan keuangan yang dilaporkan secara periodik. Berdasarkan data jawaban responden, rata-rata responden menjawab setuju dengan persentase frekuensi sebesar 71,60%. Hal ini berarti sistem akuntansi keuangan dengan SAP, pengidentifikasian dan pencatatan transaksi dan pembuatan laporan keuangan yang dilaporkan secara periodik dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Solok. Berdasarkan pengujian hipotesis, variabel penerapan SAKD memengaruhi kualitas LKPD Kota Solok.

Hal ini menunjukkan bahwa pegawai yang melakukan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Hasil penelitian ini konsisten mendukung hasil riset yang dilakukan oleh (Surya Adhitama, 2017), hasil penelitian tersebut membuktikan variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kemudian penelitian (Liza Rahayu, 2014) juga memperoleh hasil penelitian yang sama.

### **Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan hasil penelitian pengujian hipotesis dari penelitian ini diketahui bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan ditandai dengan hasil uji  $t$  sebesar 0,373 dengan nilai Sig 0,711. Berdasarkan hasil data jawaban responden, masih banyaknya para responden yang belum menyelaraskan tujuannya dengan tujuan organisasi, dan lebih mementingkan tujuan individu.

Dapat diartikan bahwa semakin tinggi komitmen organisasi suatu kesatuan kerja maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. (Herman, 2015) menyatakan bahwa dengan terciptanya pemerintahan yang bersih akan meningkatkan kesadaran pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah, dengan didukung oleh kompetensi pegawai disertai dengan komitmen organisasi yang tinggi dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan SAP maka akan menghasilkan berkualitas.

Dengan demikian, semakin tinggi komitmen organisasi dari semua elemen mengoperasionalkan fungsi-fungsinya, maka semakin berkualitas laporan keuangan daerah yang dihasilkan suatu organisasi. Dalam penelitian ini memperoleh hasil berbeda diperoleh dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Rahman Arif, 2017), yang menyatakan bahwa komitmen organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

### **Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan hasil uji  $t$ , diketahui nilai  $t$  variabel sistem pengendalian internal sebesar 1,388 dengan nilai Sig 0,173. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Solok. Hal ini disebabkan oleh ketidaksignifikan diebabkan karena, lingkungan pengendalian pada masing-masing SKPD belum diterapkan dengan baik dimana belum sesuai

dengan SOP dan atasan belum maksimal melakukan pemeriksaan terhadap catatan akuntansi, fisik, kas dan barang.

Sistem pengendalian internal dipergunakan apabila kesalahan atau penyimpangan yang diakibatkan oleh *human error* baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja dapat diminimalisir. Sistem pengendalian internal yang baik sangat diperlukan dalam mengatasi berbagai permasalahan di organisasi tersebut (Lailatur Rohmah, 2020).

Hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Yohanes Suhardjo (2019) dimana riset tersebut menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## **SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN**

### **Simpulan**

1. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Solok.
2. Komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Solok.
3. Sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Solok.

### **Saran**

1. Penelitian berikutnya hendaknya dapat memasukkan variabel lain, sehingga akan mampu memperoleh hasil riset yang lebih baik lagi.
2. Setiap satuan kerja seharusnya memiliki sumberdaya yang baik dan berkompeten dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam kompetensi sumberdaya manusia dan komitmen organisasi, karena berdasarkan hasil jawaban pada kompetensi sumberdaya manusia masih terdapat kurangnya pengetahuan (*upgrade*) responden tentang pelaporan akuntansi. Kemudian, dalam komitmen organisasi masih banyaknya para responden yang mengutamakan kepentingan individu daripada kepentingan organisasi.
3. Penelitian berikutnya diharapkan dapat menambah sampel yang lebih banyak lagi sehingga akan memperoleh hasil yang lebih kuat.

### **Keterbatasan**

1. Peneliti tidak dapat memberikan kuesioner secara langsung kepada responden dan mendampingi responden dalam mengisi kuesioner. Hal ini disebabkan oleh kesibukan responden. Kendala ini menyebabkan tidak dapat diketahui apakah responden benar-benar mengisi kuesioner dengan baik. Juga, peneliti tidak dapat secara langsung menjawab hal-hal yang tidak diketahui oleh responden terkait pertanyaan yang ditanyakan dalam kuesioner.
2. Variabel penelitian masih dirasa belum cukup untuk mengukur faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah.

### **Daftar Pustaka**

- Adhitama, S. (2017). Pengaruh Penerapan Standar Akuntanasi Pemerintah (SAP), Sistem Akuntanasi Keuangan Daerah (SAKD), Dan Kompetensi Sumberdaya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten Ogan Ilir). *Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang* .
- Anna Sumaryati, E. P. (2020). Accounting Information System, Internal Control System, Human Resource Competency and Quality of Local Government Financial Statements in Indonesia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business Vol 7 No 10 (2020) 795–802 , 795-802.*

- Arif, R. (2017). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi Dan Kejelasan Tujuan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Padang Panjang). *Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang* .
- As Syifa Nurillah, D. M. (2014). Pengaruh Kompetensi Sumberdaya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok). *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING Volume 3 Nomor .2Tahun 2014* , 1-13.
- Azwar, S. (2013). *Realibilitas dan Validitas Edisi 4*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2019). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan*. Retrieved from E-PPID Pusat: <https://e-ppid.bpk.go.id/>
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2019). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern*. Retrieved from E-PPID Pusat: <https://e-ppid.bpk.go.id/>
- Deddi, N. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fikri, D. A. (n.d.). Pengaruh Kompetensi Sumberdaya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Malang). *Journal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA)* .
- Fitri Mariana Tampubolon, A. B. (2019). Pengaruh Komitmen Organisasi, Kompetensi Sumberdaya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah daerah di wilayah Provinsi DKI Jakarta). *Oikos: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi, Volume III Nomor 1* , 55-65.
- Ihsanti, E. (2014). Pengaruh Kompetensi Sumberdaya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kab. Lima Puluh Kota). *Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang* .
- Jannah, M. (2016). Kompetensi Sumberdaya Manusia, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal Dan Peran Sarana Prasarana Pendukung Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta* .
- Lailatur Rohmah, N. S. (2020). Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang, E-JRA Vol. 09 No. 05* , 43-51.
- Liza Rahayu, K. Y. (2014). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Provinsi Riau (Studi Empiris Pada SKPD Provinsi Riau) . *Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru Indonesia, JOM FEKON Vol. 1 Nomor. 2* , 1-15.
- Nikita Srisillia Mawuntu, H. M. (2020). Pengaruh Kepatuhan Dan Pengawasan terhadap Kualitas Laporan Pemerintah Daerah (Studi empiris pada pemerintah kabupaten Minahasa Utara). *Jurnal Riset Akuntansi 15(2)* , 260-268.
- Nurandini, A. (2014). Analisis Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan (Studi pada Pegawai Perum Perumnas Jakarta). *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoror* .
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengenai kualitas laporan keuangan daerah*.
- Putriasri Pujanira, A. T. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumberdaya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY. *Staf Pengajar Jurusan Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta, VOLUME VI NOMOR 2* , 14-28.
- Sriwijayanti, H. (2018). Analisis Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Pengelolaan APBD (Studi Persepsi



- Pengelola APBD SKPD Dinas Pemerintah Kota Padang). *Jurnal EKOBISTEK Fakultas Ekonomi*, Vol.7, No. 1, 89-101.
- Suhardjo, Y. (2019). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemerintah Kota Semarang). *Majalah Ilmiah Solusi* Vol. 17, No. 4, 1-22.
- Wardani, D. Y. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ( Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Labuhanbat. *Universitas Sumatera Utara Repositori USU* .
- Yusrawati, S. M. (2016). Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Akuntansi, Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada SKPD Kabupaten Rokan Hilir). *Jurnal Ekonomi KIAM* Vol. 26 No. 1, 44-62.